

### **BAB III**

## **KRISIS PENGUNGSI PADA TAHUN 2015**

Pada tahun 2015, dibukanya kebijakan untuk imigran yang diresmikan oleh Angela Merkel yang dimana Angela Merkel menjadi Kanselir pada saat itu. Pada kebijakan tersebut, terdapat banyak pro kontra. Partai AfD adalah Partai yang paling menunjukkan tuntutan yang ditujukan pada kebijakan imigrasi tersebut. Hal tersebut bermula Setelah Partai AfD meraih suara yang cukup signifikan dalam pemilu tahun 2017, Partai AfD semakin merumuskan kebijakan alternatif untuk kemudian dapat disahkan dalam peraturan perundangan nasional Jerman. Kebijakan yang dimaksud adalah keputusan yang dianggap tidak relevan bahkan gagal dalam menjawab segala permasalahan aktual serta krusial, seperti topik suaka dan imigrasi, Islam dan identitas, perlindungan dan keamanan warga (*Alternative für Deutschland website*, 2018).

#### **A. Imigrasi**

Imigrasi adalah suatu fenomena global yang disebabkan pada ketergantungan kondisi politik ataupun ekonomi pada suatu negara imigran berasal. Pada kasus krisis imigran ini, akhir - akhir ini jumlah imigran terus meningkat. Sejak musim panas 2015, Eropa telah dihadapkan oleh meningkatnya pencari suaka yang diakibatkan pada peperangan yang terjadi di Suriah, dan juga meningkatnya kegiatan teroris di Irak Afghanistan, dan Afrika. Komisaris iinggi PBB untuk pengungsi menjelaskan bahwa terdapat kenaikan 4,7 juta orang yang melarikan diri guna untuk menyelamatkan diri dari gejolak yang berada di negara mereka dari akhir 2011, lalu meningkat secara pesat pada tahun 2015, yaitu total 15,1 juta imigran yang tercatat. Akhirnya, pada tema imigrasi tersebut timbul pada puncak agenda politik di Eropa, khususnya di Jerman (Lams, 2019).

Jerman menjadi destinasi utama sebagai negara tujuan oleh imigran, setelah Amerika. Pada akhir-akhir ini tidak ada negara sebanyak imigran yang datang ke Jerman dibandingkan dengan ke 35 negara yang tergabung dengan OECD (Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan). Sejak tahun 2015, angka imigran yang datang ke Jerman mencapai dua juta orang, hal tersebut belum tercatat dari histori sebelumnya. Dalam imigrasi tersebut, bertujuan untuk mencari perlindungan, yang dikarenakan adanya peperangan dan konflik pada negara asal imigran tersebut, seperti konflik di Suriah dan Irak. Pemerintah Federal juga telah memperjuangkan agar penyebab dari pengungsian dan juga imigrasi yang tidak teratur bisa dikurangi, pemerintah Federal juga mengusahakan penanganan serta pengendalian proses-proses migrasi secara aktif. Pada usaha tersebut, terselip agenda untuk memulangkan imigran yang tidak memenuhi kriteria sebagai imigran guna menetap di Jerman. Secara keseluruhan, kurang lebih sekitar sepuluh juta paspor asing yang tinggal di Jerman pada tahun 2016. Kelompok tersebut mencakup dari berbagai elemen, yaitu Imigran, Warga Negara Asing yang lahir di Jerman, dan di antaranya ada sekitar 42 persen yang menjadi warga negara Jerman sejak lahir. Tercatat bahwa 33 persen yang bermigrasi secara mandiri sebagai keturunan Jerman, dan 25 persen warga asing yang di naturalisasi. Faktanya bahwa pada tahun 2016, sekitar 110.400 orang asing menjadi warga negara Jerman.

Perekonomian Jerman meningkat semenjak imigran datang, karena cukup untuk melengkapi kebutuhan tenaga terampil yang kian meningkat. Pemerintah Federal menginginkan imigran untuk tetap datang guna mengatasi kekurangan tenaga terampil akibat berubahnya struktur demografis dari kebijakan Angela Merkel tersebut, akhirnya menuai kontroversi, yang dimana tidak semua imigran berperilaku baik (*Tatsachen ueber deutschland*).

Selama dibukanya jalan atau dibukanya imigrasi untuk para pengungsi pada tahun 2015 terdapat berbagai masalah yang dianggap bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga asli Jerman, seperti kejahatan sosial, pembunuhan dan pencurian. Asal punya usul dibuatnya sebuah kebijakan *Open Border* oleh Angela Merkel di karenakan agar pengungsi tersebut bisa masuk ke wilayah Jerman dan harapannya bisa menjadi solusi masalah ketenagakerjaan. Faktor ketidaktersediaan tenaga kerja yang disebut - sebut merugikan Jerman mencapai 30 Miliar Euro itu rupanya dikarenakan menurunnya angka kelahiran di negara Jerman dan semakin lama semakin menuanya umur rata-rata di Jerman, hal ini juga dilihat sangat serius bagi masa depan negara Jerman. Dan dari permasalahan tersebut, pemerintah Jerman memutuskan untuk membuka Border yang dimana nantinya harapannya agar para pengungsi bisa menjadi tenaga kerja dan bekerja di Jerman. Besar harapannya dengan program tersebut bisa menjadi solusi (Kumaran.Com, 2018).

Dalam pernyataan kebijakan *Open Door* di katakan bahwa imigran yang akan datang ke Jerman harus memiliki keahlian serta mampu berinteraksi dengan masyarakat asli Jerman. Lalu yang sedang hangat di perbincangkan masyarakat luas tentang tindakan kriminal yang di lakukan oleh imigran itu pasti memiliki faktor, seperti misalnya ketika imigran itu datang ke Jerman tetapi dia tidak punya keahlian maka dari faktor tersebut bisa di perkirakan dapat menyebabkan permasalahan sosial dan keamanan. Sepertinya dari banyaknya keluhan masyarakat yang mengatakan bahwa kehadiran imigran bisa membuat dampak yang buruk ya di karenakan banyaknya imigran yang masuk tidak memiliki keahlian tersebut. Partai *Alternative für Deutschland* atau AfD, sepertinya tidak ingin menysia-nyikan hal sensitif seperti ini (Kumaran.Com, 2018).

Pada suatu saat terdapat pertikaian ditempat penampungan di Berlin, seorang pengungsi berumur 29

tahun meninggal setelah ditembak oleh polisi. Dalam pertikaian tersebut, menurut saksi menceritakan bahwa pria yang berumur 29 tahun tersebut melecehkan putri pengungsi lain. Akhirnya pria yang berumur 29 tahun tersebut diborgol oleh polisi, akan tetapi ayah dari putri korban tersebut berusaha untuk menyerang piro yang diborgol dengan pisau, lalu polisi reflek menembaknya. Satu jam setelah peristiwa tersebut, ayah dari putri tersebut meninggal dikarenakan tembakan oleh polisi. Hal tersebut bukan hal yang satu - satunya terjadi di tempat penampungan pengungsi di Berlin (Deutsch Welle, 2016). lalu ada suatu kejadian kekerasan seksual pada malam pergantian tahun baru di daerah bernama Cologne yang dilakukan oleh pengungsi. Tiga dari pelaku penyerangan tersebut akhirnya diamankan oleh pihak yang berwajib. Polisi yang berada di lokasi kejadian tersebut kewalahan dikarenakan adda ratusan perempuan yang mengalami kekesarasan seksual yang dilakukan oleh laki - laki imigran. Dan sangat disayangkan, banyak kasus seperti itu tidak dibawa ke pengadilan atas insiden yang tidak tercela tersebut. Ternyata para pelaku kekerasan seksual tersebut didominasi oleh anak - anak muda yang berasal dari Suriah dan Afghanistan (Tribun.Com, 2018).

lalu ada juga serangan teroris yang menyebabkan islamophobia itu timbul sebagai permasalahan dikalangan warga asli Jerman. Seorang pencari suaka yang diketahui berasal dari Suriah melakukan bom bunuh diri pada halaman depan sebuah bar yang berada di Kota Ansbach, Jerman. Akibat dari teror bom bunuh diri tersebut sekitar 12 orang pejalan kaki luka - luka, tiga diantaranya kritis. Latar belakang pelaku tersebut ternyata pernah ditolak permohonan suakanya oleh pemerintah Jerman setelah di selidiki lebih dalam oleh polisi (Merdeka.Com, 2016).

Pada kejadian terorisme tersebut setidaknya ada tiga serangan dalam sepekan terakhir yang menimpa negara bagian Jerman. Yang pertama adalah serangan imigran dengan kapak di atas kereta, diketahui delapan orang luka

- luka. Lalu ada juga teror di Mal Olympia kota Munich, terjadi penembakan yang membabi buta yang dimana akibat dari serangan tersebut menewaskan sembilan orang. Setelah imigran melaksanakan aksi keji tersebut, imigran tersebut melakukan bunuh diri. Setelah diselidiki bahwa imigran tersebut memiliki keturunan Iran-Jerman (Merdeka.Com, 2016).

Para teroris tersebut menyusup dan menyamar sebagai pengungsi, lalu mereka melakukan serangan di negara yang di tujukan. Pada kejadian - kejadian tersebut membuat warga geram atas perbuatan imigran terhadap kejadian - kejadian yang timbul. Banyak dari kalangan menilai bahwa masuknya puluhan ribu pengungsi ke Jerman malah membuat keamanan di Negara Jerman tersebut rapuh. Beberapa intelijen sudah mewanti - wanti bahwa ISIS bisa saja menyelundupkan anggotanya kapan saja dengan menyamar sebagai pengungsi (Merdeka.Com, 2016).

## **B. Reaksi terhadap Imigran di Jerman**

Dalam menjelang pemilu 2017, di Jerman sendiri memiliki berbagai fenomena yang dimana bisa menjadi peluang di berbagai Partai politik. Hal ini memberikan hal yang positif untuk Partai politik memperlihatkan keseriusan mereka dalam menampung hak aspirasi masyarakat. Dan dengan adanya berbagai fenomena yang berada di Jerman saat itu membuat para Partai politik meningkatkan daya saingnya dan secara tidak langsung kebijakan maupun tuntutan dari Partai politik tersebut sekiranya masuk dalam keinginan masyarakat.

### **1. Demonstrasi Islamophobia oleh PEGIDA**

Pada tahun 2015 itu awal di bukanya secara resmi kebijakan untuk membuka perbatasan untuk imigran yang ingin pergi ke Jerman bahkan membuka jalan bagi pencari suaka. Pada tahun 2015 tersebut menjadi tahun politik yang dimana fenomena imigran menjadi topik yang hangat

untuk di bicarakan. Kejadian yang bisa di ingat pada tahun akhir 2014, yaitu sekelompok demonstran yang di kenal dengan PEGIDA (Patriotik Eropa Melawan Islamisasi Barat) di mulai dengan gerakannya (Spies, 2017: 6).

PEGIDA (Patriotik Eropa Melawan Islamisasi Barat) sangat di kenal sebagai Anti Islam atau yang kita sering dengar dengan nama Islamophobia, PEGIDA juga menyerukan bahwa protes mereka mengedepankan nasionalisme dan memprotes sayap kanan yang kurang memperhatikan kondisi negara yang sedang di selimuti keresahan. PEGIDA dalam demonya menuntut agar penegak hukum memberikan peraturan dan perlakuan khusus terhadap imigran, yaitu terutama imigran Muslim. Pada waktu pertama kali di lakukannya demo, yaitu bertempat di Dresden, terkumpul hingga 20.000 pendemo yang akan berdemostrasi di setiap hari senin, hingga 1000 orang kurang lebih tetap melaksanakan demo sampai pada pertengahan 2016. dari antusiasnya masyarakat yang tergabung dalam gerakan PEGIDA ini menjadikannya protes yang paling sukses dan mendapatkan perhatian dalam sejarah Jerman. Hal ini tak selalu mendapatkan respon positif, faktanya dari kebanyakan Partai Kiri dan juga media menganggap demo tersebut tidak dapat di terima dan berbau rasisme. Namun Partai sayap kanan AfD (*Alternative für Deutschland*) berbeda pendapat, yang dimana Partai AfD (*Alternative für Deutschland*) ini menyatakan bahwa para demonstran adalah “Sekutu Alami” dari Partainya, kata Alexander Gauland (Spies, 2017: 6).

Di balik demo yang di lakukan PEGIDA ada hal yang harus di ketahui bahwa pendiri PEGIDA adalah Lutz Bachmann. Dimana Lutz Bachmann pernah di hukum dalam masalah keterlibatan dirinya pada tindakan kriminal, yang terkenal dengan pose Hitler nya yang tersebar di Media Sosial. Dalam konsistensinya menggelar demo, PEGIDA nampaknya tidak sia-sia dalam tuntutananya. PEGIDA sukses menarik perhatian

masyarakat dan dapat memanfaatkan ketidakpuasan warga Jerman terkait kebijakan politik dan permasalahan imigran dari pemerintah Kanselir Merkel (*Deutsche Welle*, 2018).

apabila kita pernah mendengar permainan anak-anak pada Jerman tempo dulu, yang disebut “Siapa yang takut dengan orang hitam?”. tapi kini di zaman Modern ternyata masih di hantui dengan rasa takut yang di buat oleh orang dewasa. Orang dewasa tersebut adalah ribuan orang pendukung yang di sebut dengan gerakan patriotik Eropa yang menyerukan Anti Islam atau islamisasi Jerman dan Eropa. Gerakan ini berkali-kali mendoktrin bahwa islam adalah agama yang terdistorsi dan tidak jelas. Pada awal mulanya, PEGIDA ini mengecam kelakuan sekelompok radikal islam yang membunuh dengan sadis dan mengatasnamakan Allah di dalam video tersebut. Tetapi kini, mereka yang tergabung dalam PEGIDA itu mengeneralisir islam secara keseluruhan dengan keburukan yang di pertontonkan oleh sekelompok Islam Radikal. Semakin hari semakin banyak yang di citrakan oleh gerakan PEGIDA dengan di tambahnya Anti Warga Asing, Anti Pengungsi, Anti Pemohon Suaka, hal ini timbul di karenakan menurut mereka adalah suatu ancaman bagi Jerman dan Eropa (*Deutsche Welle*, 2015).

pada pertengahan 2015, Partai AfD (*Alternative für Deutschland*) mendapatkan 22.000 suntikan anggota baru yang di hasilkan dari hasil pemilu yang baik dan menarik banyak orang untuk bergabung dalam keanggotaan. Pada tanggal 4-5 Juli 2015 menjelang kongres Federal Partai di Essen, kepala sruktur AfD (*Alternative für Deutschland*) di Saxony, Bradenburg dan Thuringia, dan juga Rhine-Whestphalia Utara tersebut di kelompokkan dalam asosiasi yang berada dalam Partai yang di sebut juga Platform Patriotik. Mereka menuntut agar AfD (*Alternative für Deutschland*) lebih kritis terhadap isu imigran dan pengungsi. Mereka menyarankan Partai AfD (*Alternative für Deutschland*) untuk mendukung gerakan PEGIDA di karenakan sejalan dengan fokus politik Partai.

Alih-alih memperebutkan PEGIDA yang berbasis di Dresden, dalam internal AfD (*Alternative für Deutschland*) terbagi menjadi 2 sayap yang berbeda, yaitu Liberal Konservatif dan Nasional Konservatif. Bernd Lucke menganggap PEGIDA sebagai gerakan yang Xenophobia, Islamophobia, dan menjauhkan diri darinya. Sementara di kubu Frauke Petry, menganggap bahwa protes yang di selenggarakan oleh PEGIDA harus di kawal dan di dukung dalam kegiatan demonstrasi PEGIDA yang secara rutin di laksanakan di setiap minggu di kota Dresden, Partai AfD (*Alternative für Deutschland*) juga ikut andil dalam aksi-aksi tersebut (Ciechanowicz, 2017: 3).

Di sisi lain AfD (*Alternative für Deutschland*) tidak hanya mengikuti serangkaian demosntrasi yang di lakukan PEGIDA, tetapi juga lebih meningkatkan progresifitasnya dalam upaya keamanan. Dalam upaya keamanan yang di serukan oleh Partai AfD (*Alternative für Deutschland*), mereka mengeluarkan argumen-argumen yang dimana menjadi fokus politik mereka, seperti adanya bahaya tentang pengungsi, agama, ekoomi, tindakan kekerasan yang di lakukan oleh pengungsi dan tidak efektifnya kebijakan yang di keluarkan oleh Kanselir Jerman Angela Merkel. Beberapa petinggi AfD (*Alternative für Deutschland*) dan PEGIDA kompak berkata bahwa dalam tema isu agama, agama islam datang membawa sejuta keresahan yang bisa kita lihat dengan mata kita sendiri dimana mereka dekat dengan kekerasan, mereka akan menjajah agama dan akan memberikan doktrin radikal yang akan mempengaruhi nilai-nilai kristen yang selama ini berlaku di Jerman. Dalam beberapa tindak kekerasan di Jerman yang dilakukan oleh pengungsi seperti penyerangan dengan menggunakan senjata tajam, penembakan warga sipil oleh pengungsi, serta bom bunuh diri. Dalam beberapa kasus tersebut, AfD (*Alternative für Deutschland*) memanfaatkan sebagai barang bukti yang konkret atas dasar ketakuan yang selama ini di seru kan

pada demo yang di selenggarakan oleh AfD (*Alternative für Deutschland*) dan PEGIDA. Mereka berpendapat bahwa hal-hal tersebut bisa membahayakan bagi kehidupan warga di Jerman (Nugroho, 2016: 45).

## **2. Penolakan Kebijakan *Open Door***

Pada awal kebijakan *Open Door* imigran yang dilakukan oleh Kanselir Angela Merkel pada tahun 2015 memberikan berbagai macam pro dan kontra yang di hasilkan oleh kebijakan *Open Door* tersebut. Seiring berjalannya waktu, kebijakan *Open Door* itu sendiri di sambut dengan antusias oleh para imigran yang akan mengungsi di Jerman (Dettmer & Katschak, 2015).

Dengan di bukanya kebijakan pengungsi tersebut harapannya agar para pengungsi yang datang mendapatkan pelajaran dan pengalaman yang cukup, sehingga ketika kembali lagi di negara asal mereka bisa memberikan kontribusi pada rekonstruksi politik dan sosial negara asal mereka, sekaligus dengan kembalinya mereka haru didukung oleh program rekonstruksi internasional. Tak bisa di pungkiri Kebijakan tradisional pemberian suaka, itu bebas dari penyalahgunaan dari sistem yang ada, dan menghasilkan penyelesaian yang cukup cepat dan berhasil di Eropa, terkhusus Jerman, dengan orang-orang yang beragam Budaya dan dari berbagai Wilayah (*Program dasar AfD dari Alternative für Deutschland*.web, 2017).

Pada kebijakan ini bertanggungjawab penuh atas para pengungsi atau imigran yang akan berimigrasi itu tenggelam di Laut Mediterrania. Partai *Alternative für Deutschland* atau AfD sangat ingin sekali mencegah konsekuensi yang di terima oleh imigran ketika akan menuju ke Negara yang ditujunya. Dan Partai *Alternative für Deutschland* atau AfD ingin agar resiko yang menyebabkan masalah pada sosial dan agama serta budaya kian lama bisa punah ini dicegah dengan sistematis. Menurut Partai *Alternative für Deutschland* kebijakan suaka Uni Eropa secara umum itu gagal, dikarenakan

Perjanjian Dublin (secara garis besar perjanjian dublin: Negara yang menjadi tujuan pengungsi juga bertanggung jawab atas proses suaka nya) itu dilanggar oleh negara-negara Uni Eropa Selatan, serta gagalnya pemerintah Jerman. Dengan kegagalan tersebut disinyalir Partai Alternative für Deutschland menganjurkan untuk menutup perbatasan di setiap Negara bagian Uni Eropa. Mereka Partai AfD berpikiran bahwa pusat penampungan dan suaka sebaiknya tetap didirikan di daerah-daerah yang aman di negara masing-masing imigran berasal, seperti misalnya di Afrika Utara. Pada program yang dicanangkan Partai Alternative für Deutschland tersebut menurut mereka juga harus dalam perlindungan di bawah PBB dan Uni Eropa. Dengan demikian orang-orang yang bermigrasi di Jerman dan Uni Eropa itu harus didorong kembali ke negara-negaranya masing-masing. Apabila pusat-pusat penampungan tidak bisa di setujui oleh PBB dan Uni Eropa, Jerman akan mendirikan pusat-pusat penampungan tersebut di negara-negara yang amas sesuai dengan standar negara-negara masing-masing pengungsi dan perawatan yang memadai (*Program dasar AfD dari Alternative für Deutschland*.web, 2017).

Para pencari suaka yang mengajukan suaka di Jerman harus dikembalikan lagi ke negara asalnya, yang dimana kasus mereka akan ditangani, jika mereka terbukti tidak aman di negara mereka masing-masing, maka mereka berhak mendapatkan suaka dan harus dipindahkan ke Jerman dengan Aman. Menurut Partai Alternative für Deutschland, pada pos pemeriksaan yang di perbatasan harus di kontrol dengan ketat untuk mencegah imigran ilegal masuk agar tidak menyebabkan masalah yang akan terjadi. Partai Alternative für Deutschland akan mengganti hak individu suaka dengan hukum konstitusional, yaitu untuk memberikan jaminan instisional. Sejak akhir 2014, para pembuat kebijakan imigrasi dan prongungsi yang dilakukan oleh Kantor Federal Jerman telah dituntut untuk secara umum mengakui bahwa terjadinya malpraktek yang

dimana belum ada nya verifikasi identitas, negara asal, atau kebangsaan. Yang terpenting saat ini bahwa pembuat keputusan atau Kantor Federal Jerman harus mampu untuk membuat keputusan sendiri yang independen. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencegah pengaruh politik pada malpraktek imigran (*Program dasar AfD dari Alternative für Deutschland.web*, 2017).

Dengan pemantauan tempat penampungan yang terletak di negara masing-masing yang di landa perang itu harus ditingkatkan pencegahannya terkhusus imigran. Dengan program tersebut besar harapannya bisa menghemat pendanaan menangani migrasi dibandingkan untuk mendanai migrasi yang tidak teratur di Jerman. Sebaliknya, ketika program tersebut tidak menemui titik temu, Partai *Alternative für Deutschland* menginginkan untuk pemerintah mengontrol para pengungsi yang datang agar dikualifikasi dari segi profesionalitas, kemampuan, kualitas dan kuantitas sebelum memasuki Jerman, ini dilihat sangat penting. Hal tersebut adalah Hak Prerogatif utama dari Negara yang berdaulat dan berlaku tanpa syarat untuk Jerman. Menurut Partai *Alternative für Deutschland*, setiap imigran seharusnya memiliki kewajiban untuk berintegrasi atau melakukan pembauran. Mereka harus bisa beradaptasi dengan rumah barunya dan bukan malah sebaliknya. Apabila biassanya masalah ditimbulkan pada imigran, bisa ditandai bahwa mereka gagal untuk berintegrasi dengan warga lokal Jerman. Maka dari itu proses integrasi harus dibuat sedemikian rupa bagus nya agar para pengungsi ini mendapatkan tempat tinggal yang permanen dan bisa kita lihat itu sebagai proses integrasi yang sukses. Siapapun yang menolak untuk berintegrasi maka harus dikenakan sanksi dan berbuah pada tidak diperbolehkannya untuk tinggal secara permanen (*Program dasar AfD dari Alternative für Deutschland.web*, 2017).

Berbicara mengenai imigrasi lebih kompleks, biaya imigrasi tidak dibuat dengan transparan oleh pemerintah

Jerman, yang diperkirakan berkisar sekitar ratusan miliar Euro. Selain itu terdapat biaya tersembunyi yang sangat besar guna untuk perawatan dan kehadiran pengungsi disemua tingkat administrasi. Ketika kebijakan imigrasi massal di buka, terjadilah harga yang ditetapkan secara sewenang-wenang dibanyak tempat. Tidak ada perhitungan biaya disinyalir memang disengaja oleh pemerintah Federal dan negara bagian Jerman. Dengan permasalahan ini, Partai *Alternative für Deutschland* menginginkan untuk mereorganisasi yang mendasar dari dana yang disodorkan guna imigrasi. Menurut Partai *Alternative für Deutschland* biaya seberapa besarnya harus tetap dipublikasikan di khalayak umum. Dengan masing-masing imigran yang berasal dari negara yang sedang perang itu kesejahteraannya tidak di rinci secara terperinci dan di jaga kerahasiannya. Hal ini berarti bahwa pencari suaka yang sudah di setujui dan yang belum di setujui akan menerima kesejahteraan yang sama, dan di sisi lain berhasilnya atau gagalnya integrasi tidak dapat di evaluasi. Partai *Alternative für Deutschland* menuntut transparansi dalam masalah tersebut. Berbicara mengenai kejahatan serta perilaku negatif dari pengungsi tersebut bisa diindikasikan bahwa mereka yang tidak memiliki kualitas dan keterampilan yang dibutuhkan dalam integrasi. Mereka terpicat dengan Jerman yang beralasan palsu. Harapan para pengungsi untuk bisa lebih makmur ketika datang ke Jerman yang akhirnya tidak terpenuhi itu menimbulkan resiko bahwa dari sebagian mereka terseret dalam kejahatan. Ada bukti dibeberapa masalah yang disebabkan oleh pengungsi tersebut telah disamarkan atau ditutupi oleh pemerintah dan media (*Program dasar AfD dari Alternative für Deutschland*.web, 2017).

pada akhirnya Partai *Alternative für Deutschland* membuat gerakan nyata untuk mengubah tindakan kriminal tersebut. Kejahataan yang dilakukan oleh pengungsi itu sulit di lawan, karena kesulitan dalam berbahasa. Keadaan di Mahkamah Agung pun hampir

tidak mungkin untuk membuat sebuah keputusan untuk mengakhiri tempat tinggal pengungsi yang bermasalah tersebut dan hal tersebut sebuah kekeliruan yang harus diubah. Partai *Alternative für Deutschland* ingin membuat mekanisme hukum untuk sebagaimana mungkin atau seberapa kecil masalahnya untuk memberikan sanksi dan menarik hak tempat tinggal untuk para penjahat yang sudah meresahkan warga lokal menjadi lebih mudah dan cepat prosesnya. Menurut Partai *Alternative für Deutschland* ini adalah cara yang paling efektif untuk memerangi kejahatan yang dilakukan oleh imigran (*Program dasar AfD dari Alternative für Deutschland*.web, 2017).

Partai *Alternative für Deutschland* juga menuntut agar diberlakukannya perlindungan dengan khusus warga asli Jerman terhadap kejahatan pengungsi yang datang. Pada pernyataan tersebut, Partai *Alternative für Deutschland* ingin bahwa ada kerjasama antara lembaga penegak hukum, pidana, dan otoritas imigrasi yang dimana dianggap sebagai sektor yang sangat penting dan efisien. Hal tersebut dilakukan agar harapannya dengan seefektif mungkin terlaksana keamanan bagi seluruh warga asli Jerman, serta mencegah pelanggaran hukum dan penyalahgunaan undang-undang suaka. Hal-hal ini nyatanya diabaikan oleh Uni Eropa tentang suaka dan imigrasi, yang telah mengakibatkan otoritas imigrasi dalam negeri tidak berlaku dan pertumbuhan imigran yang kian hari makin banyak. Terkait pada akhir dari gejolak imigran, tindakan yang terakhir adalah naturalisasi. Partai *Alternative für Deutschland* ini percaya bahwa kewarganegaraan Jerman tidak terpisahkan dengan bahasa dan budaya. Kewarganegaraan Jerman diketahui mendapatkan kerugian yang besar dalam beberapa tahun terakhir. Ada sebuah kesalahan yang dimana anak-anak di berikan kewarganegaraan Jerman atau dinaturalisasi dengan otomatis, meskipun orang tua mereka bukan berasal dari warga Jerman asli. Kewarganegaraan Jerman

sehaarusnya diberikan untuk imigran yang sudah cukup umur. Hal tersebut akan mengesampingkan anak-anak akan dinaturalisasi dengan otomatis dari orang tua asing. Anak-anak tersebut sebaiknya diberikan Kewarganegaraan dengan pertimbangan bahwa salah satu orang tua nya berkewarganegaraan asli Jerman (*Program dasar AfD dari Alternative für Deutschland*.web, 2017).

Menurut hasil survei *Pew Research Center*, Jerman menjadi urutan pertama yang menerima pengungsi dengan jumlah yang sangat banyak daripada negara-negara Eropa lainnya (Connor, 2016). pada saat itu para pebisnis yang berada di Jerman berkeyakinan bahwa, dengan datangnya para pengungsi, bisa membuat potensi yang kuat pada sektor ketenagakerjaan, yang tentunya akan menunjang kekuatan perekonomian Jerman (Dettmer & Katschak, 2015).

Pada tanggal 31 Agustus 2015, diadakannya konferensi pers yang dimana dalam konferensi pers tersebut Angela Merkel menyatakan “Wir Schaffen das” yang artinya kita pasti bisa. Dalam pernyataan tersebut, Angela Merkel mendeklarasikan kalau Jerman berada dalam kondisi yang siap menerima ratusan ribu pengungsi yang di karenakan perang saudara yang terjadi di Suriah dan sekitarnya. Dalam deklarasi tersebut, Angela Merkel berpendapat bahwa dibalik arti dibukanya pintu untuk para pengungsi tersebut merupakan hak yang bisa dilakukan oleh suatu negara guna untuk melindungi mereka yang sedang berada dalam bahaya. Inti dari kebijakan *Open Door* adalah diperuntukkan bagi pengungsi yang ingin mencari tempat yang lebih aman dan dapat melakukan pengajuan permohonan suaka seperti pengungsi Suriah dan Negara Timur Tengah lainnya. Kebijakan *Open Door* ini di resmi kan pada tanggal 1 september 2015, dan seiring berjalannya waktu, jumlah pengungsi yang datang sebanyak 890.000 datang ke Jerman melewati Balkan (*Deutsche Welle*, 2016).

selang beberapa lama, dengan adanya permasalahan yang ditimbulkan oleh pengungsi yang datang ke Jerman, rupanya menjadi sorotan bagi pihak-pihak yang anti kepada orang asing. Pada kejadian ini mempunyai fakta bahwa tidak semua pihak menyetujui kebijakan *Open Door*. Mereka terdiri dari gerakan Partai AfD (*Alternative für Deutschland*), PEGIDA, Partai NDP (*National Democratic Party*). Protes yang di gencarkan oleh pihak-pihak yang Anti terhadap asing tersebut mempunyai dasar yang tak lepas dari ideologi yang di anut Partai tersebut. Tepat pada satu bulan setelah di resmikannya kebijakan *Open Door*, ribuan masyarakat Jerman berbondong-bondong mengikuti demonstrasi yang diselenggarakan oleh gerakan PEGIDA (*Deutsche Welle*, 2015). mereka berpendapat bahwa dengan dibukanya pintu bagi para pengungsi yang mayoritas beragama islam ini dapat menumbuhkan islamisasi dan dari ketakutan tersebut akhirnya menciptakan kekhawatiran bagi tatanan nilai bangsa Jerman (Thran & Boehnke, 2015: 178).

pada kasus ini, ternyata berhasil dimanfaatkan oleh Partai sayap kanan, yaitu AfD (*Alternative für Deutschland*). meskipun Partai AfD (*Alternative für Deutschland*) statusnya masih menjadi Partai yang tergolong baru, tetapi Partai AfD (*Alternative für Deutschland*) ini berhasil “bermain” pada isu Xenophobia dan islamophobia sehingga dalam strategi tersebut mereka dapat memikat suara pendukung, bahkan dari pendukung Partai lain ada yang beralih mendukung Partai AfD (*Alternative für Deutschland*) dikarenakan sesuai dengan kekhawatirannya (*Deutsche Welle*, 2016).

Partai AfD (*Alternative für Deutschland*) menyoroiti beberapa permasalahan yang timbul seperti masuknya para pengungsi, terorisme dan kriminalitas. Yang jelas bahwa dalam penolakan dari Partai AfD (*Alternative für Deutschland*) ini membuahkan hasil dimana dalam pemilihan umum, Partai AfD (*Alternative für Deutschland*) dapat memenangkan beberapa kali

pemilihan umum di tingkat negara bagian, yaitu pada Maret 2016 di Saxony-Anhalt dengan 24,2 persen suara, dan di Rhineland-Palatinate dengan 15,1 persen suara. Demikian juga pemilihan umum regional yang diselenggarakan pada 4 September 2016 di Mecklenburg-Western Pomerania dengan 20,8 persen suara. Sedangkan pemilihan umum di negara bagian Berlin mendapatkan 14,1 persen suara yang diselenggarakan pada 18 september (*Deutsche Welle*, 2016).

### **C. Reaksi tokoh AfD (*Alternative für Deutschland*)**

#### **Terhadap imigran**

Pada tahun 2016, muncul sebuah pernyataan kontroversial yang dimana Frauke Petry sebagai pemimpin Partai AfD (*Alternative für Deutschland*) memberikan pernyataan yang kontroversial dimana dia mengatakan kepada surat kabar Jerman yang bernama *Mannheimer Morgen*, Frauke petry berkata “Saya tidak ingin (polisi menembak imigran) ini, tetapi penggunaan senjata dapat digunakan sebagai upaya terakhir..”. pada pernyataan tersebut banyak yang menilai bahwa Frauke Petry tidak manusiawi dan terlihat sadis. Seorang anggota senior dari Partai Sosial Demokrat Jerman mengatakan bahwa hal tersebut mengingatkan dia pada Erich Honeker, pemimpin Komunis Jerman Timur yang jatuh pada tahun 1989, yang juga membolehkan polisi menembak para imigran. Pada pernyataan Frauke Petry tersebut juga mendapatkan klarifikasi dari pihak kepolisian langsung, dimana pihak kepolisian mengatakan bahwa pihak kepolisian tidak akan menembak para imigran. Pihak kepolisian pun mengatakan bahwa pernyataan Frauke petry tersebut Tidak Manusiawi. Gauland mengaitkan insiden Chemnitz dengan kebijakan pengungsi Kanselir Merkel. Dia menyebutnya perlu bahwa Wakil FDP Wolfgang Kubicki melihat hal serupa. Gauland mengatakan bahwa di Chemnitz seorang pria yang tidak bersalah telah dibunuh oleh dua orang yang tidak bisa berada di Jerman dan yang

tidak akan berada di sini tanpa kebijakan Kanselir (Detik News, 2016).

Gauland mengatakan pada Finthammer bahwa “Pembunuhan ini, terus terang saja, telah membangkitkan emosi, emosi yang ada hubungannya dengan fakta bahwa mereka mungkin pencari suaka. Saya juga tidak tahu pasti, tetapi bagaimanapun juga dikatakan seorang Irak dan seorang Suriah. Dan itu – cukup jelas – seluruh kebijakan pengungsi sehingga untuk berbicara di atas meja. Dan Anda tahu tentang kebijakan pengungsi ini, dan kami sangat mengkritiknya, karena kami telah memprediksi dengan tepat apa yang terjadi berulang kali. Tapi saya belajar, kami bukan satu-satunya. Mr Kubicki juga mengatakan bahwa apa yang terjadi di Chemnitz adalah milik Nyonya Merkel. Dan saya tahu dia telah menerima banyak kritik, tetapi setidaknya itu dari sebuah pesta yang tidak dekat dengan AfD. Saya pikir apa yang benar-benar salah adalah bashing Saxon yang kekal ini, yang juga Anda temukan tanpa terputus di media, bahwa Saxon difitnah sebagai orang-orang hutan dan Jerman gelap. Dan kami hanya merumuskan apa yang cukup normal, apa yang ada di Freiburg dan Wiesbaden dan Kandel juga, yaitu kemarahan (*Deutschlandfunk*, 2018).

Alexander Gauland juga memberikan suaranya terhadap alasan mengapa Kanselir Jerman Angela Merkel membuat kebijakan *Open Door*. Saat diwawancara oleh Finthammer disebuah acara, Alexander Gauland mengatakan “bahwa Saya sudah mengatakan itu dalam wawancara dengan dunia. Tidak ada, Karena itu hanya cara baru untuk menarik orang datang ke negara ini secara ilegal dan kemudian berharap bahwa istilah ini, perubahan jalur, jika mereka tidak mendapatkan suaka, mereka entah bagaimana dapat tinggal di sini. Dan justru kebijakan inilah yang kami anggap benar-benar salah. Bukan hanya saya, tetapi seluruh AfD. Dan itulah mengapa saya pikir, perubahan jalur dari A sampai ke Z adalah solusi yang salah untuk masalah yang sama sekali berbeda. Itulah

tepatnya yang tidak kita inginkan. Dan itulah mengapa kedua, perubahan jalur itu salah. Kita harus lebih terlibat dalam melatih orang-orang kita sendiri. Tidak mungkin untuk menyelesaikan masalah perburuhan ini – yang saat ini ada pada saat boom – melalui imigrasi, terutama karena imigran yang datang, tentang hak suaka, tentu saja bukan yang kita butuhkan sebagai pekerja. Ini selalu salah. Dan mereka sekarang juga mengalami ini dari peristiwa di Freiburg” (*Deutschlandfunk*, 2018).

Selanjutnya ada pula kecaman yang ditujukan kepada Partai AfD (*Alternative für Deutschland*) yang dimana dalam program politiknya meresmikan untuk bersikap Anti Islam. Dari publikasi program tersebut, nyatanya menuai kecaman yang datang dari berbagai elemen, yaitu Organisasi Islam, Kristen dan Yahudi di Jerman. Aiman Meyzek, Ketua umum Dewan Sentral Muslim Jerman, menganggap bahwa larangan pembuatan masjid tersebut mengalihkan perhatian publik dari isu yang lebih mendesak. Tak hanya larangan pembuatan masjid, tetapi juga melarang perempuan muslim mengenakan pakaian burka dan menolak status badan hukum untuk organisasi islam. Gereja Protestan Jerman juga mengecam sikap Anti Islam, menurut Gereja Protestan Jerman dalam sikap politik AfD (*Alternative für Deutschland*) tersebut menumbuhkan benih Islamofobia dan mengutarakan kebencian. mereka memberikan pernyataan sikap yang dimana seharusnya kongres Partai mengancam kekerasan yang terjadi pada pengungsi, kata presiden Gereja Protestan Jerman, Heinrich Bedford-Storhm. Hal senada juga di utarakan oleh kaum Yahudi yang berada di Jerman, mereka berkata bahwa dengan program dari AfD (*Alternative für Deutschland*) telah meninggalkan ranah kostitusi, kata Ketua Dewan Yahudi Jerman, Josef Schuster (*Deutsche Welle*, 2016).